AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

BRICS Plus dan Restrukturisasi Tatanan Global: Analisis Neo-Realisme, Soft Power, dan Constructivism terhadap Pergeseran Kekuasaan Dunia

Bimo Tri Artomo[1], Tatok Djoko Sudiarto[2], Khairizah[3]
Universitas Paramadina, Indonesia
E-mail Korespondensi : bimo.artomo@students.paramadina.ac.id

Submitted: 18th Sept 2025 | **Edited**: 26th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Artomo, B. T., Sudiarto, T. D., & Khairizah, K. (2026). BRICS Plus dan Restrukturisasi Tatanan Global: Analisis Neo-Realisme, Soft Power, dan Constructivism terhadap Pergeseran Kekuasaan Dunia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 531-544.

ABSTRACT

The expansion of BRICS into the BRICS Plus framework reflects a broader transformation in the global order amid declining Western dominance and the growing assertiveness of emerging economies. While existing studies largely emphasize the economic implications of BRICS enlargement, limited attention has been given to its combined material, normative, and identity-based dimensions. This study aims to analyze how BRICS Plus contributes to the restructuring of the global order by integrating Neo-Realist, Soft Power, and Constructivist perspectives. Employing a qualitative descriptive approach, the research is based on systematic literature analysis of academic journals, policy reports, and official BRICS documents. Data are examined through thematic content analysis to identify patterns related to power balancing, non-coercive influence, and identity construction among BRICS Plus members. The findings indicate that BRICS Plus functions not only as a mechanism of collective balancing against Western-dominated institutions through alternative financial arrangements, but also as a platform for projecting soft power and promoting a shared Global South identity. The study concludes that the influence of BRICS Plus is derived from the interaction between material capabilities, normative appeal, and collective identity formation, positioning it as a significant actor in the ongoing transition toward a more multipolar and inclusive global order.

Keywords: BRICS Plus, Global Order, Soft Power, Neo-Realism, Constructivism

PENDAHULUAN

Sejak kemunculan akronim BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada awal abad ke-21, kelompok negara berkembang ini telah menjadi aktor penting dalam dinamika tatanan global yang mengalami pergeseran kekuatan. BRICS tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi pesat negara-negara anggotanya, tetapi juga merepresentasikan aspirasi kolektif untuk mereformasi struktur tata kelola ekonomi dan politik internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional, BRICS berupaya

menantang institusi global lama dan mendorong sistem global yang lebih inklusif dan representatif (Moch, 2024).

Perkembangan signifikan dari inisiatif ini adalah ekspansi BRICS ke format yang lebih luas dan inklusif yang dikenal sebagai BRICS Plus. Perluasan ini mencerminkan upaya strategis untuk memperluas jaringan pengaruh ke negara-negara berkembang lainnya, khususnya di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Ekspansi tersebut tidak semata-mata bertujuan menambah keanggotaan, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi politik dan meningkatkan representasi Global South dalam arsitektur global yang semakin multipolar. Fenomena ini sekaligus menunjukkan meningkatnya ketegangan terhadap dominasi finansial dan moneter Barat, terutama peran dolar Amerika Serikat serta pengaruh lembaga-lembaga seperti IMF dan World Bank (Khan & Hayat, 2025).

Transformasi tatanan global yang didorong oleh BRICS Plus berlangsung seiring dengan melemahnya dominasi hegemonik Amerika Serikat dalam sistem internasional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa negara-negara emerging kini memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berperan aktif dan menuntut posisi yang lebih setara dalam tata kelola global. Cochrane dan Zaidan (2024) mencatat bahwa kekuatan Amerika Serikat mengalami penurunan relatif dan absolut seiring dengan kemunculan aktor-aktor baru yang semakin berpengaruh. Dalam konteks ini, BRICS Plus dapat dipahami sebagai manifestasi kolektif dari perubahan struktur global, di mana negara-negara berkembang mulai berpindah dari posisi perifer menuju pusat diskursus global.

Dari perspektif ekonomi, pembentukan dan ekspansi BRICS Plus didorong oleh kepentingan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang dikendalikan Barat. Ekspansi ini menandai tantangan terhadap dominasi institusi ekonomi Barat sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama Selatan–Selatan sebagai alternatif strategis (Imam, 2025). Bentuk kerja sama tersebut mencakup perdagangan intra-anggota, pembiayaan infrastruktur, serta penguatan lembaga keuangan alternatif seperti New Development Bank (NDB). Dengan demikian, BRICS Plus berfungsi sebagai instrumen konkret untuk meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang dalam ekonomi global, bukan sekadar forum simbolik.

Selain dimensi ekonomi, BRICS Plus juga membawa implikasi institusional dan normatif yang signifikan. Negara-negara anggotanya berupaya memperkuat identitas

kolektif sebagai aktor yang memiliki kapasitas membentuk aturan internasional. Ekspansi BRICS berpotensi meningkatkan pengaruh negara-negara berkembang dalam organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan lembaga Bretton Woods, sekaligus mendorong pembentukan tatanan normatif yang lebih adil dan seimbang (Jütten & Falkenberg, 2024).

Namun demikian, dinamika BRICS Plus tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara internal, keberagaman kepentingan, sistem politik, dan orientasi strategis antaranggota berpotensi menghambat kohesi dan konsensus kolektif. Katz (2024) menekankan bahwa ekspansi yang luas dapat meningkatkan kapabilitas sekaligus memperbesar potensi fragmentasi internal. Dari sisi eksternal, respons negara-negara Barat dan sikap lembaga global yang mapan terhadap agenda perubahan BRICS Plus menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas inisiatif ini.

Dari perspektif geopolitik, BRICS Plus mencerminkan pergeseran distribusi kekuasaan global dan pembentukan jaringan aliansi baru di antara negara-negara berkembang. Greene (2023) menunjukkan bahwa ekspansi BRICS telah memperkuat posisi Asia, Afrika, dan Timur Tengah dalam tatanan global. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Neo-Realisme sebagai pendekatan utama, dilengkapi dengan teori Soft Power dan Konstruktivisme, untuk menganalisis bagaimana BRICS Plus memadukan kekuatan material, ide, dan identitas kolektif dalam upaya membangun tatanan global alternatif yang lebih inklusif dan representatif.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama dalam kajian Hubungan Internasional, yaitu Neo-Realisme, Soft Power, dan Konstruktivisme, yang diposisikan secara saling melengkapi untuk menganalisis dinamika BRICS Plus dalam restrukturisasi tatanan global. Ketiga kerangka ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menekankan distribusi kekuatan material, tetapi juga memperhitungkan dimensi normatif dan konstruksi identitas kolektif dalam politik global kontemporer.

Neo-Realisme dan Keseimbangan Kekuasaan Global

Dalam perspektif Neo-Realisme, sistem internasional dipahami sebagai arena anarkis yang mendorong negara bertindak rasional demi mempertahankan kelangsungan dan kepentingan nasionalnya. Mengacu pada pemikiran Waltz, perubahan struktur

kekuasaan global akan mendorong negara-negara untuk melakukan strategi penyeimbangan (balancing) terhadap dominasi aktor hegemonik. Dalam konteks pasca-Perang Dingin, melemahnya dominasi relatif Amerika Serikat membuka ruang bagi negara-negara emerging untuk membentuk koalisi alternatif guna meningkatkan posisi tawar kolektif mereka (Mearsheimer, 2019).

BRICS Plus dapat dipahami sebagai bentuk institutional and soft balancing, di mana negara-negara berkembang membangun kerja sama ekonomi, finansial, dan politik di luar institusi yang didominasi Barat. Pembentukan New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) menunjukkan upaya kolektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan global yang berbasis dolar (Kirshner, 2022). Dari sudut pandang Neo-Realisme, ekspansi BRICS ke format BRICS Plus memperkuat kapasitas material dan geografis koalisi ini, sekaligus menandai pergeseran distribusi kekuatan dalam sistem internasional menuju pola multipolar yang lebih kompleks.

Soft Power dan Legitimasi Global BRICS Plus

Meskipun Neo-Realisme menekankan aspek material, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana BRICS Plus memperoleh penerimaan dan legitimasi global. Oleh karena itu, teori Soft Power menjadi pelengkap penting dalam kerangka analisis ini. Nye menegaskan bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari kemampuan koersif, tetapi juga dari daya tarik nilai, kebijakan, dan institusi yang dianggap sah oleh aktor lain. Dalam praktiknya, BRICS Plus berupaya membangun citra sebagai representasi Global South yang mengedepankan prinsip kesetaraan, non-intervensi, dan pembangunan bersama (Nye, 2021).

Soft power BRICS Plus diwujudkan melalui diplomasi budaya, kerja sama pendidikan, pertukaran akademik, serta kolaborasi riset dan teknologi. Program seperti BRICS Network University dan berbagai forum masyarakat sipil menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan dan persepsi positif di tingkat internasional (Ramos & Zayas, 2020). Pendekatan ini memperkuat legitimasi normatif BRICS Plus sebagai alternatif terhadap tatanan liberal Barat, sekaligus memperluas pengaruhnya tanpa bergantung pada kekuatan militer.

Konstruktivisme, Identitas Global South, dan Pembentukan Norma

Jika Neo-Realisme dan Soft Power menyoroti kekuatan dan pengaruh, Konstruktivisme memberikan pemahaman mengenai bagaimana identitas, norma, dan makna bersama membentuk perilaku negara. Perspektif ini menekankan bahwa tatanan internasional bukan hanya hasil distribusi kekuatan, tetapi juga konstruksi sosial yang berkembang melalui interaksi dan wacana. Dalam konteks BRICS Plus, pembentukan identitas kolektif Global South menjadi elemen kunci yang menyatukan negara-negara dengan latar belakang politik dan ekonomi yang beragam (Acharya, 2019).

BRICS Plus tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama pragmatis, tetapi juga sebagai proyek normatif yang menantang dominasi wacana Barat mengenai pembangunan, demokrasi, dan tata kelola global. Melalui narasi multipolaritas dan keadilan global, BRICS Plus berupaya membangun norma alternatif yang menekankan kedaulatan negara dan inklusivitas (Hurrell, 2021). Namun demikian, konstruksi identitas bersama ini tetap menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan nasional dan ketimpangan kapasitas antaranggota, yang berpotensi membatasi konsistensi norma yang diusung.

Landasan Konseptual

Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, BRICS Plus dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional. Neo-Realisme menjelaskan motivasi struktural dan kepentingan material di balik pembentukan koalisi, Soft Power menerangkan strategi legitimasi dan pengaruh non-koersif, sementara Konstruktivisme mengungkap proses pembentukan identitas dan norma bersama. Sintesis ini menunjukkan bahwa kekuatan BRICS Plus tidak hanya terletak pada kapasitas ekonominya, tetapi juga pada kemampuannya membangun makna dan legitimasi dalam tatanan global yang sedang mengalami transisi menuju multipolaritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran BRICS Plus dalam restrukturisasi tatanan global. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika politik, ekonomi, dan normatif yang bersifat kompleks dan kontekstual dalam hubungan internasional (Creswell & Poth, 2019; Yin, 2020). Metode ini relevan untuk mengkaji

bagaimana negara-negara BRICS Plus memaknai perubahan struktur kekuasaan global serta membangun strategi kolektif dalam menghadapi dominasi institusi internasional yang mapan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan internasional, serta dokumen resmi BRICS dan BRICS Plus. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria inklusi tertentu, yaitu publikasi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019–2025, memiliki relevansi langsung dengan isu BRICS, multipolaritas, tata kelola global, atau teori Hubungan Internasional, serta berasal dari penerbit akademik atau lembaga internasional yang kredibel (Hennink et al., 2020). Literatur yang bersifat opini populer, tidak melalui proses penelaahan sejawat, atau tidak memiliki keterkaitan substansial dengan fokus penelitian dikecualikan dari analisis untuk menjaga kualitas dan validitas data.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis) untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan makna yang muncul dalam literatur yang dianalisis (Braun & Clarke, 2021). Proses analisis diawali dengan pengelompokan sumber berdasarkan tema utama, diikuti dengan pengodean konsep kunci yang berkaitan dengan dimensi kekuatan struktural, strategi soft power, dan pembentukan identitas kolektif Global South. Tahapan ini memungkinkan peneliti mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori Neo-Realisme, Soft Power, dan Konstruktivisme secara sistematis dan interpretatif (Saldaña, 2021; Nowell et al., 2019).

Untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis literatur dan sudut pandang akademik (Guest et al., 2020). Selain itu, refleksi kritis terhadap potensi bias interpretatif dilakukan selama proses analisis guna memastikan bahwa temuan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual (Silverman, 2020). Dengan pendekatan ini, metode penelitian tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan fenomena BRICS Plus, tetapi juga untuk menafsirkan implikasi teoretis dan normatifnya dalam dinamika transisi menuju tatanan global multipolar.

HASIL PENELITIAN

Aspek Struktur Kekuasaan dan Keseimbangan Global

Hasil analisis menunjukkan bahwa BRICS Plus berperan signifikan dalam upaya redistribusi kekuasaan global melalui penguatan kerja sama ekonomi dan finansial antaranggota serta perluasan jejaring geopolitik ke kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Temuan ini sejalan dengan studi Lee et al. (2025) yang menegaskan bahwa ekspansi keanggotaan dan inisiatif dedolarisasi merupakan strategi kolektif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dominan dalam sistem keuangan global. Masuknya negara-negara seperti Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi BRICS Plus, tetapi juga memperluas cakupan pengaruh geopolitiknya di kawasan strategis yang sebelumnya berada dalam orbit kepentingan Barat.

Dari perspektif Neo-Realisme, dinamika tersebut mencerminkan strategi balancing yang dilakukan negara-negara berkembang untuk menandingi dominasi Amerika Serikat dan institusi keuangan internasional yang telah mapan. Temuan penelitian ini menguatkan argumen Kirshner (2022) dan Mearsheimer (2019) bahwa negara-negara non-Barat cenderung membentuk koalisi alternatif ketika distribusi kekuasaan global dianggap tidak lagi mencerminkan kepentingan mereka. Pembentukan dan penguatan institusi seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) menjadi bukti empiris bahwa BRICS Plus tidak hanya bersifat simbolik, melainkan berfungsi sebagai mekanisme konkret untuk meningkatkan otonomi finansial kolektif.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan transaksi lintas mata uang dan pengembangan sistem pembayaran alternatif merupakan bagian dari upaya jangka panjang BRICS Plus dalam mengurangi dominasi dolar. Temuan ini konsisten dengan Anderson dan Yulianti (2023) yang menilai dedolarisasi sebagai strategi rasional negara-negara Global South untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan memperluas ruang kebijakan domestik. Dalam konteks ini, BRICS Plus dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang memungkinkan negara berkembang meningkatkan kapasitas kolektifnya dalam sistem internasional yang kompetitif.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengonfirmasi temuan sejumlah studi sebelumnya mengenai tantangan internal BRICS Plus. Perbedaan kepentingan politik, ketimpangan kapasitas ekonomi, serta orientasi kebijakan luar negeri yang beragam berpotensi melemahkan kohesi internal kelompok ini. Ng (2024) menyebut kondisi tersebut sebagai kecenderungan menuju hierarchical multilateralism, di mana hubungan kerja sama tidak sepenuhnya setara. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas BRICS Plus sebagai penyeimbang kekuasaan global tidak hanya ditentukan oleh kapasitas materialnya, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola perbedaan internal secara institusional dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan BRICS Plus dalam mendorong tatanan global multipolar yang lebih adil sangat bergantung pada konsolidasi internal yang kuat dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif.

Aspek Pengaruh Nilai dan Diplomasi (Soft Power)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRICS Plus secara aktif memanfaatkan strategi pengaruh nonkoersif melalui diplomasi budaya, pendidikan, dan kerja sama pembangunan untuk memperkuat legitimasi dan posisinya dalam sistem global. Program pertukaran akademik, kolaborasi riset, dan internasionalisasi pendidikan menjadi instrumen utama dalam membangun citra kolektif yang positif serta memperluas jejaring politik jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan pandangan Nye (2021) yang menempatkan soft power sebagai sumber pengaruh berbasis daya tarik nilai, serta diperkuat oleh Gauttam et al. (2024) yang menegaskan peran pendidikan dalam membentuk persepsi publik global secara berkelanjutan.

Secara empiris, diplomasi pendidikan muncul sebagai elemen soft power yang paling menonjol dalam praktik BRICS Plus. Studi Tin-Yau dan Pan (2021) menunjukkan bahwa negara-negara BRICS, khususnya Tiongkok, memanfaatkan beasiswa dan institusi budaya sebagai sarana promosi nilai harmoni dan kerja sama. Hasil penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendekatan serupa digunakan untuk membangun narasi solidaritas Selatan–Selatan dan menawarkan alternatif normatif terhadap hegemoni Barat. Dalam konteks ini, soft power berfungsi sebagai pelengkap strategi keseimbangan kekuasaan yang berbasis material.

Namun demikian, efektivitas soft power BRICS Plus masih dibatasi oleh tantangan internal, seperti disparitas kapasitas antaranggota, lemahnya institusionalisasi

program bersama, dan persoalan kredibilitas global. Sejalan dengan Stuenkel (2020) dan Tella (2023), penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengaruh nilai sangat bergantung pada konsistensi antara narasi normatif dan praktik kebijakan. Oleh karena itu, soft power BRICS Plus hanya akan efektif jika didukung oleh konsolidasi internal dan dukungan kelembagaan yang kuat, sehingga mampu berkontribusi pada pembentukan tatanan global yang lebih inklusif dan berimbang.

Aspek Identitas, Norma, dan Konstruksi Makna Global (Konstruktivisme)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRICS Plus tidak hanya berfungsi sebagai aliansi ekonomi-politik, tetapi juga sebagai proyek normatif yang berperan dalam membentuk identitas kolektif negara-negara berkembang dalam sistem internasional. Melalui forum BRICS Plus, negara-negara Global South berupaya membangun makna baru mengenai peran dan posisi mereka dalam tata kelola global. Temuan ini sejalan dengan Arapova dan Lissovolik (2021) yang menilai BRICS sebagai wadah pembentukan identitas Global South yang lebih aktif dalam menuntut keadilan global, serta diperkuat oleh Varela dan Delgado (2019) yang memandang BRICS sebagai proyek ideologis yang menawarkan alternatif terhadap sistem unipolar Barat dengan menekankan nilai kedaulatan dan kesetaraan.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi identitas bersama tersebut turut mendorong ekspansi BRICS Plus dan menarik minat negara-negara berkembang lainnya. Khan dan Hayat (2025) menunjukkan bahwa bergabungnya negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memperkuat narasi multipolaritas dan konsolidasi kekuatan non-Barat. Selain itu, keterhubungan BRICS dengan organisasi regional seperti SCO dan EAEU mencerminkan upaya memperluas jaringan normatif di luar institusi global yang didominasi Barat (Volkov & Shangaraev, 2025). Dalam perspektif konstruktivis, proses ini menegaskan bahwa norma dan identitas kolektif berperan penting dalam membentuk preferensi dan pola kerja sama antarnegara.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap keterbatasan dalam realisasi identitas dan norma bersama BRICS Plus. Perbedaan sistem politik, kepentingan nasional, dan tingkat ketergantungan ekonomi antaranggota sering kali menyulitkan konsistensi nilai yang diklaim. Sejalan dengan Wso dan Mahmood (2025), penelitian ini menegaskan bahwa meskipun BRICS Plus berhasil membangun wacana alternatif yang inklusif, implementasinya masih dibatasi oleh struktur kekuasaan dan kapasitas

institusional. Oleh karena itu, identitas kolektif BRICS Plus memiliki potensi memperkuat solidaritas Global South, tetapi transformasi norma global secara nyata memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat dan distribusi manfaat yang lebih seimbang.

Sinergi dan Tantangan dalam Strategi BRICS Plus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BRICS Plus dibangun melalui sinergi antara tiga dimensi utama, yaitu kekuatan struktural, pengaruh nilai, dan konstruksi identitas kolektif. Dari perspektif Neo-Realisme, kapasitas ekonomi dan finansial negara-negara anggota menjadi fondasi utama dalam meningkatkan posisi tawar terhadap dominasi Barat, terutama melalui institusi seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement. Dimensi ini kemudian diperkuat oleh strategi soft power yang menekankan diplomasi budaya, akademik, dan kerja sama pembangunan sebagai sarana memperoleh legitimasi global. Sementara itu, pendekatan konstruktivis menjelaskan bagaimana identitas kolektif Global South dan norma multipolaritas dibangun untuk memperkuat legitimasi normatif BRICS Plus dalam sistem internasional. Temuan ini sejalan dengan Kheyfets (2024) yang memandang BRICS Plus sebagai hasil integrasi bertahap di tengah fragmentasi geopolitik global dan pergeseran dari tatanan unipolar menuju multipolar

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural dan institusional yang membatasi efektivitas strategi BRICS Plus. Keberagaman sistem politik dan tingkat kapasitas ekonomi antaranggota sering kali menyulitkan harmonisasi kebijakan dan pencapaian konsensus bersama, sebagaimana dikemukakan oleh Bhowmick dan Bardhan (2023). Selain itu, struktur kelembagaan BRICS Plus yang relatif longgar, meskipun telah didukung oleh NDB dan CRA, berpotensi melemahkan implementasi kebijakan kolektif, terutama di tengah ekspansi keanggotaan yang cepat (Ng, 2024). Di sisi lain, agenda normatif seperti dedolarisasi masih menghadapi kendala eksternal karena dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global belum sepenuhnya tergantikan (Lee et al., 2025).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan BRICS Plus sebagai alternatif tatanan global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau narasi ideologis semata, tetapi oleh kemampuan untuk menyinergikan dimensi struktural, normatif, dan identitas secara konsisten dalam praktik kebijakan.

Tanpa konsolidasi internal yang kuat dan penguatan kelembagaan yang efektif, potensi BRICS Plus dalam mendorong tatanan global multipolar yang lebih adil dan inklusif berisiko tidak terwujud secara optimal.

Implikasi bagi Tatanan Global dan Kebijakan

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi tatanan global dan arah kebijakan negara anggota. Dari perspektif global, munculnya BRICS Plus memperkuat argumen bahwa sistem internasional semakin bergerak menuju multipolaritas, di mana tidak ada satu kekuatan hegemonik yang berkuasa secara absolut. Hal ini sejalan dengan pandangan realisme dan konstruktivisme bahwa distribusi kekuasaan bersifat dinamis sekaligus membentuk identitas baru. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa transisi menuju multipolaritas tidak terjadi secara mulus. Pergeseran kekuasaan berpotensi memicu ketegangan ketika aktor baru berupaya menegosiasikan ulang tatanan dan aturan global. Sebagaimana dicatat Ng (2024), kecenderungan format BRICS Plus yang hirarkis justru dapat menjadi sumber instabilitas apabila tidak diimbangi dengan reformasi kelembagaan yang menjamin kesetaraan antaranggota.

Pada tingkat kebijakan, negara anggota BRICS maupun calon anggota perlu memperkuat kelembagaan bersama, meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi dan finansial, serta menyinergikan agenda pembangunan dengan diplomasi nilai agar visi alternatif BRICS Plus dapat terwujud. Aleksia & Bakhtiar (2023) menegaskan bahwa BRICS berpotensi menyediakan akses investasi yang lebih adil melalui institusi bersama, tetapi efektivitasnya bergantung pada mekanisme operasional yang kuat. Selain itu, pembentukan identitas kolektif dan diplomasi nilai harus didukung oleh kebijakan nyata, bukan sekadar retorika. Bagi Indonesia atau negara lain yang berminat bekerja sama atau bergabung, kebijakan yang disarankan mencakup penguatan kapasitas nasional, penyelarasan kepentingan domestik dengan agenda BRICS Plus, serta keterlibatan aktif dalam proses institusionalisasi aliansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRICS Plus merupakan inisiatif strategis yang mencerminkan pergeseran tatanan global menuju struktur multipolar yang lebih kompleks dan dinamis. BRICS Plus tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama

ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam sistem internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan finansial, terutama melalui penguatan institusi alternatif seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement, menjadi fondasi utama dalam menantang ketimpangan struktural global.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa strategi BRICS Plus tidak semata-mata bergantung pada kekuatan material. Diplomasi nilai melalui pendidikan, budaya, dan kerja sama pembangunan berperan penting dalam membangun legitimasi global dan memperluas pengaruh normatif negara-negara anggota. Selain itu, pembentukan identitas kolektif Global South dan narasi keadilan global memperkuat dimensi konstruktivis BRICS Plus sebagai agen pembentuk norma alternatif. Dengan mengombinasikan pendekatan Neo-Realisme, soft power, dan konstruktivisme, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan membentuk strategi yang relatif pragmatis, adaptif, dan kontekstual.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap sejumlah keterbatasan yang berpotensi menghambat efektivitas BRICS Plus. Perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan kapasitas ekonomi, serta kelembagaan yang belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi tantangan utama dalam menjaga kohesi internal dan konsistensi kebijakan. Tanpa penguatan institusional yang lebih solid dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, visi BRICS Plus sebagai alternatif tatanan global yang lebih adil berisiko tidak terwujud secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan BRICS Plus ke depan sangat bergantung pada kemampuannya menyinergikan kekuatan struktural, legitimasi normatif, dan identitas kolektif secara berkelanjutan dalam praktik kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, A. (2019). *Constructing global order: Agency and change in world politics*. Cambridge University Press.

Aleksia, C., & Bakhtiar, A. R. (2023). BRICS as new alternatives in reforming international financial institutions and economic partnerships. *Insignia: Journal of International Relations, 10*(2), 145-160.

Anderson, T., & Yulianti, D. (2023). The developmental case for BRICS. *Global South Review, 5*(2), 45-64.

Bhowmick, S., & Bardhan, A. R. (2023). BRICS Plus: Enhancing multilateralism and macroeconomic opportunities. *Revista Tempo do Mundo, 33*, 289-322.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Cochrane, L., & Zaidan, E. (2024). Shifting global dynamics: An empirical analysis of BRICS+ expansion and its economic, trade, and military implications in the context of the G7. *Cogent Social Sciences, 10*(1).

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Gauttam, P., Singh, B., Singh, S., Bika, S. L., & Tiwari, R. P. (2024). Education as a soft power resource: A systematic review. *Heliyon, 10*(1), 1-12.

Greene, R. (2023). *How geopolitical concerns push BRICS members away from the dollar*. Atlantic Council.

Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2020). *Collecting and analyzing qualitative data at scale*. SAGE Publications.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. SAGE Publications.

Hurrell, A. (2021). *International society and global order: A conceptual appraisal*. Oxford University Press.

Imam, M. (2025). BRICS expansion and the emergence of a new economic world order. *Bulletin of Islamic Research, 3*(3), 397-408.

Jütten, M., & Falkenberg, D. (2024). *Expansion of BRICS: A quest for greater global influence?* European Parliamentary Research Service.

Katz, M. N. (2024). The geopolitical (in)significance of BRICS enlargement. *EconPol Forum, 25*(1), 10-13.

Khan, M. I., & Hayat, S. (2025). BRICS expansion and future prospects: Implications and policy considerations. *Journal of BRICS Studies, 3*(2), 1-8.

Kheyfets, B. (2024). BRICS Plus as a natural outcome of cumulative integration in the context of geopolitical fragmentation of the world economy. *Society and Economics, 46*(1), 109-121.

Kirshner, J. (2022). *Currency power and geopolitics*. Princeton University Press.

Lee, B. T. F., Kornphetcharat, K., & Sims, J. P. (2025). Soft power: BRICS cultural diplomacy and the rebalancing of global narratives. *International Review of Humanities Studies, 10*(2), 613-629.

Mearsheimer, J. J. (2019). *The great delusion: Liberal dreams and international realities*. Yale University Press.

Moch, E. (2024). The economic and geopolitical significance of the BRICS nations: A comparative analysis of their global influence in the 21st century. *East African Journal of Business and Economics, 7*(2), 86-100.

Ng, J. (2024). The BRICS Plus challenge and emerging hierarchical multilateralism. *Global Governance, 30*(2), 270-287.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 18*, 1-13.

Nye, J. S. (2021). *Soft power and American foreign policy*. Political Science Quarterly.

Ramos, L., & Zayas, A. (2020). South-South cooperation and the politics of development. *Third World Quarterly, 41*(6), 897-914.

Saldana, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.

Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data* (6th ed.). SAGE Publications.

Stuenkel, O. (2020). *The BRICS and the future of global order*. Lexington Books.

Tella, O. (2023). Emerging powers and institutional reform in global governance. *Global Governance, 29*(2), 185-203.

Tin-Yau, L. J., & Pan, S. (2021). The internationalisation of China's higher education: Soft power with Chinese characteristics. *Comparative Education, 57*(2), 1-20.

Wade, R. (2020). The developmental state: Dead or alive? *Development and Change, 51*(2), 348-374.

Wilson, I. (2019). *International education programs and political influence: Manufacturing sympathy?* Palgrave Macmillan.

Yin, R. K. (2020). *Qualitative research from start to finish* (2nd ed.). Guilford Press.

Zahran, G., & Ramos, L. (2022). Cultural diplomacy and soft power in emerging powers. *International Journal of Cultural Policy, 28*(4), 523-538.